

KOORDINASI PENGELOLAAN SADAR WISATA MASYARAKAT DI LOKASI OBYEK WISATA PANCUR AJI

Dwi Radial Riami, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: dwi.radial@yahoo.com

Abstrak

Kata Kunci: Koordinasi Pengelolaan, Sadar Wisata, Koordinasi Interdisciplinary, Koordinasi Inter-related.

Judul penelitian ini adalah “Koordinasi Pengelolaan Dalam Meningkatkan Sadar Wisata Masyarakat Di Lokasi Obyek Wisata Pancur Aji”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sanggau Dalam Meningkatkan Sadar Wisata Masyarakat Dilokasi Obyek Wisata Pancur Aji. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang akan sadar wisata. Ada 2 jenis koordinasi yang digunakan. Koordinasi Interdisciplinary. Pertama, kesatuan tindakan yang kenyataannya koordinasi menjadi terhambat karena adanya pihak terkait lebih mementingkan pekerjaannya masing-masing. Kedua, menciptakan disiplin, dikarenakan belum adanya kesadaran untuk bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan. Koordinasi Inter-related tidak terdapat kendala-kendala yang menjadikan koordinasi tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Abstract

Key Words: Coordination of management, tourism awareness, Interdisciplinary Coordination, Inter-related Coordination.

The title of this research is “Coordination of Management in Improving Public Tourism Awareness in Pancur Aji Resort Site”. This research is aimed to know the coordination of management which is apply by culture and tourism department of Sanggau Regency in improving public tourism awareness in Pancur aji Resort Site. There are two kinds of coordination will be used. Interdisciplinary coordination. First, unity of action in reality the coordination become blocked due to some people are more concerned with their own job. Second, create the discipline, it is because of there is no awareness to be responsible on their job that were given. Inter-related coordination have no constraints and could make it run not effective.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat di daerah, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor pariwisata daerah. Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan di daerah tujuan wisata. Dalam kedudukan yang sangat menentukan itu, maka seharusnya objek wisata dirancang dan dibangun dan dikelola secara profesional, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai objek wisata yang menarik adalah Kabupaten Sanggau. Di daerah ini terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikunjungi diantaranya adalah objek wisata Alam Pancur Aji, Sumber air panas Sipant Lotup, Goa Tang Raya, Riam Macan Goa Maria, Gorong Posok atau Batu Posok, Keraton Surya Negara Sanggau.

Dapat dilihat dari beberapa obyek wisata di Kabupaten Sanggau, maka objek wisata alam tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang terdapat di Kecamatan di Kabupaten Sanggau. Salah satunya adalah obyek wisata Pancur Aji, obyek wisata Pancur Aji merupakan obyek wisata air terjun, selain menjadi tempat rekreasi wisata air terjun bagi para wisatawan, obyek wisata Pancur Aji memiliki keindahan alam, keaneka ragaman hayati, flora dan fauna, beraneka seni dan budaya serta kehidupan sosial masyarakat. Dengan hal itu bisa menjadikan daya tarik atau kelebihan tersendiri bagi lokasi obyek wisata Pancur Aji. Adapun potensi alam yang dimiliki yaitu pohon tengkawang, pohon tengkawang

tersebut merupakan pohon yang dilindungi, selain dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam. Pohon tengkawang juga dikenal semua kalangan, karena memiliki banyak manfaat, seperti biji tengkawang tersebut dapat menghasilkan minyak yang bernilai ekonomis, kegunaannya bisa secara tradisional maupun industri pada perusahaan-perusahaan kosmetik, manfaat kayu secara legal akan sangat menghasilkan. Lokasi obyek wisata Pancur Aji juga memiliki berbagai wisata pembudidayaan flora. Wisata flora tersebut dapat dilihat dengan adanya pembudidayaan bermacam-macam anggrek, antara lain pembudidayaan anggrek hutan maupun anggrek bulan. Adanya juga penangkaran berbagai fauna, seperti buaya, orang hutan, rusa, serta berbagai macam unggas. Namun terlepas dari potensi yang menjanjikan itu, tentu masih banyak kendala yang perlu dibenahi dan belum dapat memenuhi kepuasan wisatawan yang berkunjung.

Aspek penting tersebut terwujudnya saptapesona berbasis pada masyarakat. Bentuk dukungan keterlibatan masyarakat itu berupa partisipasi masyarakat sekitar lokasi obyek wisata Pancur Aji. Pada hakikatnya masyarakat sekitar berkewajiban membantu atas terjaganya fasilitas penunjang dalam aset wisata obyek Pancur Aji. Namun hal tersebut tidak terealisasi karena masalah sifat sadar wisata yang dimiliki masyarakat sekitar. Dari realita yang terlihat dilapangan, masyarakat sekitar tidak memperdulikan masalah kebersihan dilingkungan wisata tersebut. Lokasi obyek wisata Pancur Aji terlihat kurang terawat, masalah kepedulian masyarakat merupakan masalah penting bagi lokasi obyek wisata. Sikap ramah juga diperlukan karena merupakan sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, seperti suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Ramah tamah bukan berarti harus kehilangan kepribadian atau tidak tegas dalam menentukan

keputusan. Sikap ramah merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya.

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai obyek daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan. Masyarakat disekitar obyek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat sekitar obyek wisata perlu mengetahui jenis kualitas layanan dan kebutuhan para wisatawan. Dalam hal ini Pemerintah menyelenggarakan berbagai penyuluhan langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina sadar wisata.

B. KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Koordinasi dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas Nasional dan kebersamaan dalam keberagaman. Pada hakekatnya pelestarian pariwisata menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah serta instansi yang terkait didalamnya. Pemerintah daerah memfokuskan penanganan secara langsung dalam melestarikan, membangun dan menjaga obyek wisata Pancur Aji, sehingga obyek wisata tersebut dapat dinikmati wisatawan lokal maupun mancanegara.

Menurut Salah Wahab (dalam Pendit, 2003: 32) Pariwisata adalah salah satu jenis industry baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor – sektor produktif lainnya. Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu: Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang

bersifat garis komando (*line of command*). Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi horisontal terbagi menjadi dua yaitu pertama adalah Interdisiplin; Koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Dan kedua adalah Inter-Related; koordinasi antar badan (instansi). yang instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.

Flavio Suares Correa Da Silva dan Jaume Agusti-Cullell dalam bukunya, Knowledge Coordination (2005: 5) *Coordination is at the heart of the concept of an organization, together with the concepts of agent and agency.*

Menurut Mulyono Banoewidjojo (1993:45) pengelolaan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengkombinasikan pemikiran, fasilitas proses bahan dan manusia untuk menghasilkan, memasarkan produksi atau jasa menguntungkan.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan koordinasi dalam pengelolaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Sanggau dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat sekitar obyek wisata pancur aji. Dan pendekatan penelitian kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah.

Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab

sanggau, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Sanggau dan Kepala Kelurahan Bunut. Informan ini terpilih karena dapat memberikan gambaran dan informasi data yang lengkap secara konkrit dan obyektif tentang masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan kamera digital.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

D. KOORDINASI HORIZONTAL

1. *Interdisciplinary*

a. Kesatuan Tindakan

Berkaitan dengan Koordinasi horizontal *interdisciplinary* dalam Pengelolaan Obyek Wisata Pancur Aji Kabupaten Sanggau, maka penulis melihat bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Obyek Wisata tersebut apakah dapat menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup disekitar lokasi obyek Wisata Pancur aji.

Dalam penelitian ini, penulis akan merangkumkan berbagai informasi yang telah didapatkan dari berbagai pihak terkait masalah kesatuan tindakan dalam Koordinasi pengelolaan Obyek Wisata Pancur Aji Kabupaten Sanggau. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan secara mendalam dan jelas mengenai kesatuan tindakan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat sekitar dilokasi tersebut.

Penulis mendapatkan informasi langsung dari P (51 thn) selaku Kepala Dinas, mengenai peran seperti apakah yang dilakukan untuk menyatukan tindakan dalam berkoordinasi. Berikut kutipan wawancaranya. “Disini peran Kepala Dinas untuk mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi, dengan kedekatan hubungan kerja dan berkomunikasi agar memperoleh kelancaran informasi, komunikasi tersebut sangat dibutuhkan agar dalam pelaksanaan tugas tidak terdapat kesalahan informasi (*miss communication*) atau tekanan dalam pekerjaan”.

Berkaitan dengan kesatuan tindakan, penulis juga mendapatkan informasi langsung dari P (51 thn) selaku Kepala Dinas, mengenai seperti apakah kesatuan tindakan yang dilakukan dalam koordinasi mengenai sadar wisata. Berikut kutipan wawancaranya. ”Melakukan koordinasi dalam bentuk mengagendakan perencanaan dan penyelesaian masalah secara bersama-sama, koordinasi tersebut dilakukan dengan Bidang Pariwisata, karena dalam hal mengembangkan obyek wisata adalah tugas dari Bidang Pariwisata”.

Penulis juga mendapatkan informasi langsung dari P (51 thn) selaku Kepala Dinas, mengenai faktor apa yang menjadi penghambat kesatuan tindakan tersebut. Berikut kutipan wawancaranya. “Terdapat staf/individu yang fokus mementingkan pekerjaannya masing-masing, sehingga cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan bagiannya sendiri, hal ini menjadi penghambat koordinasi”

Dapat dirangkum dari hasil wawancara diatas, Kepala Dinas selaku pimpinan harus memiliki peran penting dalam hal kedekatan hubungan dalam mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi, dengan berkomunikasi secara langsung, maka dari itu kelancaran informasi sangat dibutuhkan agar tidak adanya

kesalahan dalam bentuk (*miss communication*). Kesatuan tindakan tersebut dilakukan Kepala Dinas dengan Bidang Pariwisata. Dan koordinasi tersebut dalam bentuk mengagenda perencanaan dan penyelesaian masalah. Yang seharusnya koordinasi tersebut telah menjadi proses kegiatan dalam setiap instansi atau organisasi, namun terlepas dari masalah itu, terdapat kendala yang menjadikan kurang maksimalnya koordinasi tersebut, yaitu staff atau individu cenderung mementingkan pekerjaannya masing-masing, hal itu menjadi salah satu penghambat terjadinya koordinasi yang maksimal.

b. Menciptakan Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah hasil usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi langsung dari P (51 thn) selaku Kepala Dinas. Berkaitan dengan seperti apa peran yang dilakukan untuk menciptakan disiplin dalam berkoordinasi. Berikut kutipan wawancaranya. "Menerapkan konsep disiplin positif yaitu dengan penerapan peraturan melalui kesadaran setiap individu, penerapan kesadaran tersebut bisa dilakukan dengan memberi keyakinan bahwa tugas tersebut adalah tanggungjawab dan demi kepentingan bersama".

Penulis juga mendapatkan informasi langsung dari P (51 thn) selaku Kepala Dinas. Berkaitan faktor apa yang menjadi penghambat dalam menciptakan disiplin.

Berikut kutipan wawancaranya. "Masih terdapat kurangnya kesadaran tanggungjawab individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, tugas tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan".

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Maka dari itu dari hasil wawancara diatas penulis dapat merangkumkan, bahwa selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran pihak lain yang ada dalam naungannya. Sebaliknya bila selaku kepala Dinas tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada pihak lain. Dari hal tersebut juga, terdapat kendala yang menjadikan koordinasi tersebut belum maksimal, karena masih terdapat kurangnya kesadaran tanggungjawab individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan tidak selesai tepat waktu. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan.

2. *Inter-related*

Koordinasi tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak Kelurahan, berkaitan dengan *Inter-related*, maka penulis memperoleh informasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau yaitu P (51 thn) selaku kepala Dinas, Seperti apa koordinasi dalam bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan dengan pihak Kelurahan Bunut. Berikut kupitan wawancara. "Koordinasi yang dilakukan melalui Bidang Pariwisata, dengan memberi tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bidang Pariwisata untuk melakukan pengembangan obyek wisata Pancur Aji dengan melakukan

pertemuan berkala dan kerjasama dengan pihak Kelurahan Bunut, mengenai peningkatan mutu pariwisata, agar obyek wisata Pancur Aji menjadi unggulan.”

Menurut hasil wawancara yang didapatkan dari P (51 thn) koordinasi yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberi tanggung jawab sepenuhnya dengan Bidang Pariwisata. Untuk itu penulis merujuk pertanyaan langsung kepada F (35 thn) selaku kepala Bidang Pariwisata. Seperti apa koordinasi dalam bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan dengan pihak Kelurahan Bunut, berikut kutipan wawancara. “Koordinasi yang dilakukan dengan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan, dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan tentang pariwisata, F (35 thn) juga menambahkan dalam hal ini Bidang Pariwisata selaku pihak yang bertanggungjawab untuk pengembangan dan kelestarian obyek wisata”.

Selanjutnya ditemui ditempat berbeda pertanyaan berkaitan dengan *inter-related* penulis memperoleh informasi dari R (30 thn) selaku pihak Kelurahan Bunut. Seperti apa koordinasi dalam bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut kutipan wawancara. “Koordinasi yang dilakukan mengadakan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, dilaksanakan di kelurahan maupun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”.

Dalam hal seperti apa koordinasi yang dilakukan, kedua pihak menegaskan koordinasi tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara berkala, tempat melakukan pertemuan tersebut dilakukan di kelurahan setempat maupun di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, koordinasi tersebut berupa koordinasi pengelolaan dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan

pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat setempat untuk pentingnya menjaga aset-aset wisata yang telah ada dan diperlukan agar dapat menunjang mutu obyek wisata.

Berkaitan dengan *inter-Related* maka perlu mengetahui informasi langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apakah pernah melakukan koordinasi mengenai sadar wisata, jika pernah seperti apa koordinasi yang dilakukan mengenai sadar wisata. Berikut kutipan wawancara dengan F (51 thn) selaku pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pihak Dinas mendorong untuk bertukar pikiran dan menemukan ide-ide yang tepat dalam menyelesaikan masalah, koordinasi tersebut dilakukan dengan pihak Kelurahan Bunut, yang dilihat mempunyai peran penting dan mempunyai hubungan emosional langsung, bentuk koordinasi tersebut berupa pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS), tentunya pelibatan masyarakat juga dalam hal ini akan berkompeten pada pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan mutu masyarakat setempat, berupa merubah sikap perilaku agar lebih berwawasan lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar obyek wisata Pancur Aji”.

Hal senada juga diungkapkan oleh pihak Kelurahan Bunut. Berikut kutipan wawancara dengan R (30 thn) selaku pihak Kelurahan Bunut. “Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pernah melakukan koordinasi mengenai sadar wisata, yang berupa pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat setempat”.

Koordinasi yang dilakukan mengenai sadar wisata yang telah diungkapkan kedua pihak yaitu berupa pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan mutu

masyarakat sekitar agar lebih berwawasan lingkungan, koordinasi tersebut menurut pembina langsung dari pihak Bidang Pariwisata koordinasi dilakukan dengan pihak Kelurahan karena pihak Kelurahan mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan masyarakat sekitar obyek wisata Pancur Aji.

Berkaitan dengan masalah koordinasi, penulis mendapatkan informasi dari F (35 thn) selaku pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengenai sudah tepatnya koordinasi tersebut dilakukan. Berikut kutipan wawancaranya. “Dari pihak Dinas merasa sudah tepat, karena berkoordinasi dengan pihak Kelurahan akan dapat mengurangi permasalahan yang ada, disamping pihak kelurahan yang mengatur langsung masyarakat dilokasi, pihak kelurahan juga sudah paham karakter-karakter masyarakat perindividu, jadi dianggap mudah bagi pihak Kelurahan untuk mengarahkan masyarakat agar bertindak kearah sadar wisata”.

Inter-related adalah kesatuan tindakan antar badan (instansi) dalam hal berkoordinasi pengelolaan obyek wisata Pancur Aji, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Bunut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, guna meningkatkan mutu kerja sama yang baik, koordinasi tersebut bergerak demi kelanjutan obyek wisata. Hubungan kerja yang dianggap belum maksimal bisa terelakkan dengan menyatukan tindakan setiap pihak terkait melalui komunikasi. Karena komunikasi tidak terlepas dari koordinasi, dari sejumlah pihak akan dapat berkoordinasi berdasarkan rentang dimana sebagian besar itu akan ditentukan oleh adanya komunikasi dari kedua pihak dalam rangka saling mengarahkan dan saling mendukung. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

mengungkapkan perihal koordinasi ini sudah tepat, dikarenakan pihak Kelurahan sudah paham karakter-karakter masyarakat perindividu, jadi dianggap mampu dalam mengarahkan masyarakat setempat.

Selanjutnya berkaitan dengan koordinasi *inter-related* penulis mendapatkan informasi langsung dari F (35 thn) selaku Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau. Bagaimana tanggapan pihak terkait dalam melakukan koordinasi tersebut. Berikut kutipan wawancaranya. “Tanggapan pihak terkait dirasa merespon dengan baik, dengan melakukan pertemuan selalu hadir, disini juga pihak Dinas dapat mensosialisasikan tujuannya, agar sejalan dan paham terkait pemberdayaan tersebut”.

Begitu juga tanggapan dari pihak Kelurahan R (30 thn) mengenai tanggapannya terkait dalam koordinasi tersebut. Berikut kutipan wawancaranya. ”Baik, karena koordinasi yang dilakukan berguna bagi kelestarian obyek wisata, dengan cara menuntun ke arah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan masyarakat sekitarnya dapat menerima dan dapat merespon secara baik”.

Melihat tanggapan dari kedua pihak, pihak Dinas mengatakan pihak Kelurahan merespon dengan baik dalam koordinasi tersebut, begitu juga sebaliknya, tetapi pihak Kelurahan mengatakan dan berharap masyarakat setempat bisa menerima sosialisasi ini, karena masyarakat masih dianggap belum menyadari sepenuhnya arti dari sadar wisata. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan kedua pihak harus ditingkatkan lagi, koordinasi secara berkala dan berkelanjutan perlu ada respon yang kuat dari masyarakat tersebut. Koordinasi harus terpusat dan terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan saling mengisi dan memberi.

Berkaitan dengan koordinasi *inter-related* mengenai apa yang dilakukan agar koordinasi tersebut berjalan dengan lancar. Penulis mendapatkan informasi dari F (35 thn) selaku pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan. Berikut kutipan wawancaranya. "Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu, oleh karena itu untuk terwujudnya sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang ada, maka koordinasi mutlak dilakukan"

Mengenai koordinasi *inter-related*, penulis juga mendapatkan informasi langsung dari R (30 thn) selaku pihak Kelurahan. Apa yang dilakukan agar koordinasi tersebut berjalan dengan lancar. Berikut kutipan wawancaranya. "Koordinasi dilakukan dengan hubungan langsung dengan pihak Dinas, hubungan tersebut dilakukan juga antar kelompok sadar wisata yang telah dibentuk, bahkan saling silang antar ketiganya, dengan hal itu pihak Kelurahan bisa menilai permasalahan yang ada pada masyarakat dan merencanakan cara pemecahan masalahnya terkait sadar wisata".

Hasil wawancara dari kedua belah pihak yang berkoordinasi mengenai apa yang dilakukan agar koordinasi tersebut berjalan dengan lancar, koordinasi tersebut harus bersifat aktif dan tidak menunggu, dilakukan dengan hubungan saling silang langsung antar kedua belah pihak tanpa perantara bahkan dengan kelompok sadar wisata yang telah dibentuk. Untuk merencanakan cara pemecahan masalah, kedua pihak harus bertindak aktif untuk mengimplementasikan pemberdayaan secara signifikan agar terjaganya obyek wisata Pancur Aji.

Disamping itu penulis juga mendapatkan informasi tentang faktor apa saja yang mendukung dan menjadi penghambat proses koordinasi, dan bagaimana cara

mengatasinya. F (35 thn) selaku pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan, berikut kutipan wawancaranya. "Faktor yang mendukung koordinasi tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak kelurahan, tugas yang diberikan kepada pihak Kelurahan tidak terlalu berat, karena pihak Kelurahan mempunyai skedul kerja saling keterkaitan dalam hal menjaga lokasi obyek wisata Pancur Aji, dan merasa tidak memiliki penghambat, sehingga dapat menjamin penyelesaian pekerjaan secara tepat dan berkesinambungan, untuk lebih meningkatkan koordinasi tersebut pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan pendekatan teknik-teknik dasar dalam penyatuan peranan berupa saling merencanakan tujuan dasar untuk bertindak memecahkan masalah".

Berkenaan dengan *inter-related*, koordinasi yang dilakukan untuk pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Koordinasi yang dilakukan antar instansi antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak Kelurahan Bunut dipandang tidak memiliki kendala-kendala yang menjadikan koordinasi tersebut tidak berjalan dengan efektif, karena pihak kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah. Dapat juga dilihat dari fungsi pihak Kelurahan yang menjadi pelaksana kewenangan pemerintah daerah, berupa pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina lembaga kemasyarakatan dan pelaksana tugas lain yang sesuai dengan fungsinya.

E. PENUTUP

1. Koordinasi *Interdisciplinary*

Kesatuan tindakan dalam koordinasi pengelolaan obyek wisata Pancur Aji, koordinasi ini dipandang belum efektif dan efisien karena masih banyak terdapat masalah-masalah yang cukup krusial yaitu dalam kenyataannya koordinasi terhambat

karena adanya staf atau individu lebih mementingkan pekerjaannya masing-masing sehingga dapat menghambat suatu kerjasama dalam berkoordinasi dalam pengelolaan obyek wisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam hal perencanaan suatu pengelolaan obyek wisata, juga dapat mengontrol dan mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan obyek wisata. Koordinasi juga tidak terlepas dari komunikasi antara kedua belah pihak, demi terhindarnya (*miss communication*). berkaitan hal tersebut penulis berharap tindakan yang dilakukan harus ditingkatkan lagi, tidak ada lagi mementingkan pekerjaan masing-masing, demi tujuan bersama harus berkoordinasi secara efektif dan efisien.

Menciptakan disiplin, kendala dalam koordinasi tersebut adalah belum adanya kesadaran untuk bertanggungjawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan. Masalah koordinasi ini dinilai menjadi dampak pada pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata yang belum memiliki kesadaran wisata yang diharapkan. Dalam menciptakan disiplin, harus terciptanya dulu kesadaran masing-masing individu agar berkeyakinan tugas tersebut adalah tanggungjawab.

2. Koordinasi *Inter-related*

Inter-related Koordinasi ini dipandang sudah maksimal dilakukan kedua pihak yang terkait dalam membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS), namun sampai saat ini kesadaran masyarakat akan sadar wisata masih belum ada. Koordinasi yang dilakukan antar instansi antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak Kelurahan Bunut dapat dilihat tidak memiliki kendala-kendala yang menjadikan koordinasi tersebut tidak berjalan dengan efektif dan efisien, karena tugas pokok pihak kelurahan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah. Dan fungsi pihak Kelurahan yang menjadi pelaksana kewenangan pemerintah daerah,

berupa pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina lembaga kemasyarakatan dan pelaksana tugas lain yang sesuai dengan fungsinya. Penyatuan setiap pekerjaan dengan tepat akan berdampak pada koordinasi yang maksimal, oleh karena itu tindakan koordinasi yang maksimal maka akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar wisata dalam menjaga obyek wisata Pancur Aji. Maka dari itu dari kedua belah pihak harus memaksimalkan lagi tindakan dalam koordinasi dalam mengsinkronisasikan setiap pekerjaan antara keduanya. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang sudah dibentuk diharapkan terbina secara baik dan harus berjalan dengan semestinya.

F. REFERENSI

- Banoewidjojo. Mulyono. 1993. *Manajemen Dasar*. Jakarta. Prakarsa
- Flavio Soares Correa dan Silvia, Jaume Agusti- Cullell. 2003. *Knowledge Coordination*. Englan: John Wilet dan Sons Ltd
- Hasibuan. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan asalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara
- Pendit S. Nyoman. 2003. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Wahab. Salah. 2003. *Manajemen Kepariwistaan*. Jakarta: Pradnya Paramita

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DWI RADIAL RIAMI
NIM / Periode lulus : E01105095
Fakultas/Jurusan : ISIP/IA
E-mail address/HP : dwi.radial@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ILMU ADMINISTRASI (*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

KOORDINASI PENGELOLAAN DALAM MENINGKATKAN
CADAR WISATA MASYARAKAT DI LOEAN OBYEK
WISATA PANCUR AJI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. E. M. S. R.
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 18 - APRIL - 2013

DWI RADIAL RIAMI
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).